

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap manajemen perusahaan memiliki tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh kehati – hatian dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu bentuk dari pertanggungjawaban tersebut yaitu laporan keuangan, dimana laporan keuangan memberikan informasi tentang hasil dari kegiatan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dan memberikan informasi penting yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang terkait antara lain seperti investor, kreditor, pemilik, dan manajemen itu sendiri dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disajikan haruslah sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku. Dalam SAK, setiap perusahaan diberikan kebebasan untuk memilih dan menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi perusahaan dalam pembuatan laporan keuangan, salah satunya yaitu dengan penerapan prinsip konservatisme. Konservatisme sendiri dapat diinterpretasikan sebagai sikap kehati – hatian dalam pembuatan laporan keuangan untuk mengantisipasi ketidakpastian yang ada, dan risiko yang mungkin timbul diharapkan dapat dipertimbangkan dengan memadai.

Berbicara tentang konservatisme, sampai saat ini pun masih menjadi hal yang pro dan kontra. Di satu sisi, konservatisme dianggap perlu karena dapat membatasi tindakan manajer untuk membesar – besarkan laba serta memanfaatkan informasi yang asimetri ketika menghadapi klaim atas aset perusahaan (Givoly dan Hayn, 2000 dalam Savitri, 2016:34). Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa alasan untuk mendukung atau pro terhadap penerapan konservatisme dalam pembuatan laporan keuangan adalah karena hal tersebut dapat mengurangi perilaku oportunistik dari manajer untuk menyajikan aset perusahaan dan laba yang *overstated* agar kinerjanya dinilai baik, dan juga untuk dapat mengantisipasi ketidakpastian yang ada di dalam dunia bisnis.

Namun di sisi lain, menurut Basu (1997) dalam Savitri (2016:35), konservatisme dianggap sebagai sistem akuntansi yang bias. Hal ini dikarenakan sesuai dengan prinsip konservatisme akuntansi dimana mengakui biaya dan kerugian lebih cepat, serta mengakui pendapatan dan keuntungan lebih lambat. Sehingga berdasarkan pendapat tersebut, alasan untuk tidak mendukung atau kontra terhadap penerapan konservatisme dalam pembuatan laporan keuangan adalah karena hal tersebut dapat menjadikan informasi yang disajikan bias dan tidak andal karena tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Terlebih lagi di era seperti sekarang ini, dimana terdapat perubahan standar akuntansi keuangan (SAK) yang sebelumnya mengacu pada US GAAP (*United States Generally Accepted Accounting Principles*) menjadi IFRS (*International Financial Reporting Standard*) atau yang lebih dikenal dengan istilah konvergensi IFRS. Setelah konvergensi IFRS, prinsip konservatisme yang sebelumnya berlaku seolah – olah berkurang tingkat penerapannya atau bahkan dihilangkan dan kemudian digantikan dengan prinsip *prudence*, walaupun pada dasarnya dalam prinsip *prudence* masih mengandung unsur konservatisme.

Ada beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia terkait kurangnya memperhatikan prinsip konservatisme akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan, salah satunya yaitu PT. KAI (Kereta Api Indonesia) (Hikmah, 2013). PT. KAI diduga telah melakukan manipulasi data dalam laporan keuangannya pada tahun 2005, dimana PT. KAI dicatat meraih keuntungan sebesar Rp 6,9M, namun setelah diteliti dan dikaji lebih dalam lagi justru perusahaan tersebut malah mengalami kerugian sebesar Rp 63M. Setelah diteliti hasil auditnya, kemudian ditemukan adanya beberapa kejanggalan dalam laporan keuangan tersebut. Salah satunya yaitu adanya pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih selama 3 tahun, tetapi dalam laporan keuangan dimasukkan sebagai aset. Dimana seharusnya berdasarkan SAK, jika pendapatan tidak dapat tertagih maka tidak bisa dikelompokkan sebagai aset, tetapi menjadi beban dengan kelompok pendapatan tidak tertagih ([www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)).

Berdasarkan fenomena tersebut, jelas terlihat bahwa PT. KAI tidak menerapkan prinsip konservatisme dalam pembuatan laporan keuangannya karena tidak mengakui beban secepatnya atas pendapatan yang tidak tertagih tersebut

sehingga menunjukkan laba yang tinggi. Hal tersebut dapat menyesatkan para pihak yang berkepentingan dalam menggunakan informasi yang disajikan pada laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, konservatisme akuntansi berperan penting dalam pembuatan laporan keuangan.

Banyak penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti lain yang berusaha untuk menemukan faktor – faktor yang mempengaruhi penerapan konservatisme akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan, salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lasdi (2009). Dimana dalam penelitian tersebut terdapat faktor – faktor yang diduga mempengaruhi konservatisme akuntansi antara lain kontrak hutang, kontrak kompensasi, litigasi, pajak, dan biaya politis. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Lasdi (2009) tersebut, dengan menambahkan beberapa variabel lain yang juga diduga memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi, yaitu seperti set kesempatan investasi dalam penelitian Andreas *et al.*, (2017), kepemilikan institusional dan kesulitan keuangan dalam penelitian Risdiyani dan Kusmuriyanto (2015), dan tata kelola perusahaan dalam penelitian Wilantoro (2010). Namun, hasil dari penelitian – penelitian tersebut masih menunjukkan hasil yang beragam atau tidak konsisten, seperti penelitian yang dilakukan Andreas *et al.*, (2017) yang menunjukkan hasil bahwa set kesempatan investasi berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi, namun tidak sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Wahyudiyati (2010) yang menunjukkan hasil bahwa set kesempatan investasi tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

Selain itu hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Risdiyani dan Kusmuriyanto (2015) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional dan kesulitan keuangan berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi, namun tidak sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Brilianti (2013) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi, dan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) yang menunjukkan bahwa kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Kemudian hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Lasdi (2009) menunjukkan bahwa kontrak hutang dan litigasi berpengaruh

terhadap konservatisme akuntansi, namun tidak sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Brilianti (2013) yang menunjukkan bahwa kontrak hutang tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi, dan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) yang menunjukkan bahwa litigasi tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan hasil dari penelitian Lasdi (2009) untuk variabel kontrak kompensasi, pajak dan biaya politis menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Brilianti (2013) yang menunjukkan bahwa kontrak kompensasi berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi, penelitian yang dilakukan oleh Dewi *et al.*, (2014) yang menunjukkan bahwa pajak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi, dan penelitian yang dilakukan oleh Oktomegah (2012) yang menunjukkan bahwa biaya politis berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Lalu hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Wilantoro (2010) menunjukkan hasil bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi, namun tidak sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Ahmar (2016) yang menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

Roychowdhury dan Watts (2006) dalam Saputri (2013), memberikan gambaran tentang hubungan antara set kesempatan investasi dan konservatisme akuntansi, dimana akuntansi secara tradisional tidak merespon perubahan nilai pertumbuhan dan aset tak berwujud perusahaan. Akuisisi dan perubahan nilai akibat penurunan nilai dari aset biasanya tidak dicatat kecuali secara eksternal diperoleh dan dapat diverifikasi (seperti *goodwill* manajer dan akuisisi). Konsekuensinya apabila terjadi penurunan nilai aset yang tidak dicatat, maka perusahaan tidak dapat mengakuinya. Hal tersebut mengarahkan perusahaan pada tingkat konservatisme yang rendah terutama ketika nilai perusahaan dipengaruhi oleh nilai pertumbuhan dan nilai aset tidak berwujud perusahaan. Maka dari itu, secara singkat dapat dikatakan bahwa set kesempatan investasi yang semakin besar atau tinggi akan rawan dengan adanya penurunan nilai aset terutama aset tidak berwujud yang tidak diakui, dan secara otomatis berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

Harahap (2012), menyatakan bahwa penerapan prinsip akuntansi yang konservatif pada penyusunan laporan keuangan akan semakin tinggi apabila kepemilikan saham oleh pihak institusional tinggi. Investor institusional akan memiliki hak yang lebih besar sehingga investor institusional akan mengawasi tindakan dan kinerja manajemen lebih ketat, sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen laba dan cenderung meminta manajemen untuk menerapkan akuntansi yang konservatif, dan terhindar dari penyajian laba yang *overstatement*.

Dalam teori akuntansi positif menyebutkan bahwa manajer akan cenderung mengurangi penerapan konservatisme akuntansi apabila perusahaan mengalami tingkat kesulitan keuangan (*financial distress*) yang tinggi (Suprihastini dan Pusparini, 2007 dalam Noviantari dan Ratnadi, 2015). Kesulitan keuangan dapat mendorong pemegang saham untuk mengganti manajer perusahaan karena kinerja manajer dianggap buruk dan tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik, sehingga hal ini secara otomatis mendorong manajer untuk mengurangi penerapan konservatisme akuntansi dan justru cenderung melakukan manajemen laba agar kinerjanya dapat terlihat baik dan agar dapat menarik kreditor ataupun investor agar mau menanamkan dananya kepada perusahaan agar perusahaan tetap dapat bertahan dan tidak bangkrut.

Menurut Oktomegah (2012), kontrak hutang (*debt covenant*) memprediksi bahwa manajer cenderung untuk menyatakan laba dan aset secara berlebihan untuk mengurangi renegotiasi biaya kontrak hutang ketika perusahaan berusaha melanggar kontrak hutangnya, dan manajer juga tidak ingin kinerjanya dinilai kurang baik apabila laba yang dilaporkan konservatif. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Lasdi (2009) dimana penggunaan *leverage* sebagai proksi dari *debt covenant* yang menunjukkan kecenderungan perusahaan untuk melanggar perjanjian hutang.

Kepemilikan manajerial merupakan proksi dari kontrak kompensasi (Lasdi, 2009). Struktur kepemilikan manajerial yang tinggi dibanding dengan pihak eksternal perusahaan akan menyebabkan perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang konservatif. Hal ini dikarenakan manajemen memiliki tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang juga sekaligus untuk memenuhi keinginannya sendiri, jadi tidak hanya memikirkan

besarnya bonus yang akan didapat tapi juga mementingkan kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*). Begitupun sebaliknya, apabila kepemilikan manajerialnya rendah maka manajer lebih cenderung tidak konservatif agar kinerjanya terlihat baik oleh pihak eksternal perusahaan. Hal ini dikarenakan pihak investor akan percaya bahwa mereka akan mendapat dividen yang besar dari laba yang tinggi yang ditunjukkan dalam laporan keuangan dan dapat menarik calon investor lainnya. Selain itu manajer juga akan mendapatkan bonus yang besar apabila laba yang ditunjukkan tinggi karena itu menunjukkan bahwa kinerja manajer baik. Hal ini lah yang mendorong manajer akan melaporkan laba lebih besar (Suaryana, 2008).

Menurut Seetharaman *et al.*, (2002) dalam Juanda (2009), terdapat tiga upaya untuk mendorong dalam pengungkapan informasi agar terhindar dari tuntutan dan ancaman litigasi yaitu memilih kebijakan akuntansi yang cenderung konservatif, menunda berita baik, dan pengungkapan berita buruk dengan segera dalam laporan keuangan. Pernyataan yang berlebihan dari aset bersih cenderung menghasilkan biaya litigasi yang lebih besar dibandingkan dengan pernyataan aset bersih yang lebih rendah. Penerapan konservatisme akuntansi dengan menyatakan aset bersih yang lebih rendah dapat mengurangi risiko litigasi (Watts, 2003a dalam Lasdi 2009). Risiko litigasi juga didukung oleh lingkungan hukum suatu wilayah. Dimana pada lingkungan hukum yang sangat ketat, maka manajer cenderung menyajikan laporan keuangannya secara konservatif agar terhindar dari ancaman tuntutan hukum atau litigasi. Begitupun sebaliknya, pada lingkungan hukum yang longgar maka dorongan manajer untuk menyajikan laporan keuangan secara konservatif akan berkurang (Francis *et al.*, 1994 dalam Nugroho, 2012).

Pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan sangat berkaitan dengan laba perusahaan dan ukuran perusahaan. Dimana ukuran perusahaan secara tidak langsung dapat memberikan opini bagi pemerintah bahwa ukuran perusahaan berkaitan dengan laba perusahaan yang berujung pada besaran pajak penghasilan perusahaan. Misal, perusahaan besar biasanya memberikan opini bahwa perusahaan tersebut dapat menghasilkan laba yang besar pula apabila dibandingkan dengan perusahaan kecil, yang nantinya akan berdampak pada besarnya pembayaran pajak penghasilan perusahaan tersebut. Dalam hal

pembayaran pajak penghasilan ini terdapat konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pemerintah dimana pemerintah menginginkan perusahaan dapat membayarkan pajaknya dengan jumlah besar, namun dari sisi manajemen perusahaan justru menginginkan pembayaran pajak dengan jumlah kecil. Hal ini lah yang mendorong manajemen perusahaan menerapkan konservatisme agar pembayaran pajaknya rendah, dan hal ini sejalan dengan pendapat dari Widya (2004) dalam Dewi *et al.*, (2014) bahwa suatu perusahaan dengan pajak yang besar akan cenderung memilih akuntansi yang konservatif.

Sama halnya seperti pajak, biaya politis juga berkaitan dengan ukuran perusahaan. Dimana perusahaan besar biasanya mendapat pengawasan yang lebih dari pemerintah dan masyarakat sehingga menghadapi biaya politis lebih besar dibanding perusahaan kecil. Biaya politis mencakup semua biaya (transfer kekayaan) yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan tindakan politis antara lain seperti pajak, biaya sumbangan untuk partai politik, tuntutan buruh, dan lain sebagainya. Proses pengalihan kekayaan tersebut biasanya menggunakan informasi akuntansi, seperti laba perusahaan. Jika perusahaan besar menghasilkan laba yang besar secara relatif permanen, maka pemerintah dapat terdorong untuk menaikkan pajak dan meminta layanan publik yang lebih tinggi kepada perusahaan (Lo, 2005 dalam Wilantoro, 2010). Hal ini lah yang mendorong manajemen perusahaan untuk menerapkan konservatisme akuntansi. Manajer memiliki kecenderungan untuk memperkecil laba yang disajikan dalam laporan keuangan guna mengurangi biaya politis yang potensial (Watts dan Zimmerman, 1986 dalam Lasdi, 2009). Timbulnya biaya politis ini juga disebabkan karena adanya konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah yang memiliki wewenang untuk melakukan pengalihan kekayaan dari perusahaan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku baik peraturan perpajakan maupun peraturan lainnya (Oktomegah, 2012).

Perusahaan yang memiliki komitmen yang baik dalam memberikan informasi yang transparan, akurat, dan tidak menyesatkan bagi investornya dapat dikatakan telah memiliki tata kelola yang baik dan terpercaya (Pratanda dan Kusmuriyanto, 2014). Perusahaan yang telah memiliki tata kelola yang baik maka senantiasa akan menerapkan konservatisme akuntansi dalam penyajian laporan

keuangannya. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut akan selalu berusaha agar kelangsungan hidup perusahaan dapat terjaga misalnya dengan tidak menyajikan laba yang *overstatement* yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil – hasil dari penelitian sebelumnya, uraian informasi, data, serta fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi mengenai konservatisme akuntansi agar lebih mengetahui dan dapat menunjukkan bukti secara empiris atas faktor – faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum dan sesudah konvergensi IFRS dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Perbedaan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Konservatisme Akuntansi Sebelum Dan Sesudah Konvergensi IFRS (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2008 – 2010 Dan 2013 – 2016)”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah set kesempatan investasi mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum dan sesudah konvergensi IFRS?
2. Apakah kepemilikan institusional mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum dan sesudah konvergensi IFRS?
3. Apakah kesulitan keuangan mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum dan sesudah konvergensi IFRS?
4. Apakah kontrak hutang mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum dan sesudah konvergensi IFRS?
5. Apakah kontrak kompensasi mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum dan sesudah konvergensi IFRS?
6. Apakah litigasi mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum dan sesudah konvergensi IFRS?
7. Apakah pajak mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum dan sesudah konvergensi IFRS?



8. Apakah biaya politis mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum dan sesudah konvergensi IFRS?
9. Apakah tata kelola perusahaan mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum dan sesudah konvergensi IFRS?
10. Apakah terdapat perbedaan faktor – faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum dan sesudah konvergensi IFRS?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris atas:

1. Set kesempatan investasi mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum dan sesudah konvergensi IFRS.
2. Kepemilikan institusional mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum dan sesudah konvergensi IFRS.
3. Kesulitan keuangan mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum dan sesudah konvergensi IFRS.
4. Kontrak hutang mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum dan sesudah konvergensi IFRS.
5. Kontrak kompensasi mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum dan sesudah konvergensi IFRS.
6. Litigasi mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum dan sesudah konvergensi IFRS.
7. Pajak mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum dan sesudah konvergensi IFRS.
8. Biaya politis mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum dan sesudah konvergensi IFRS.
9. Tata kelola perusahaan mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum dan sesudah konvergensi IFRS.
10. Perbedaan faktor – faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi sebelum dan sesudah konvergensi IFRS.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai prinsip konservatisme akuntansi dan faktor – faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi, antara lain seperti set kesempatan investasi, kepemilikan institusional, kesulitan keuangan, kontrak hutang, kontrak kompensasi, litigasi, pajak, biaya politis, dan tata kelola perusahaan, serta menambah kemampuan dalam penerapan ilmu yang telah diperoleh peneliti selama masa perkuliahan sehingga dapat menjadi bekal dikemudian hari. Dan juga sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.

2. Bagi peneliti lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi serta pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai konservatisme akuntansi dan faktor – faktor yang mempengaruhinya antara lain seperti set kesempatan investasi, kepemilikan institusional, kesulitan keuangan, kontrak hutang, kontrak kompensasi, litigasi, pajak, biaya politis, dan tata kelola perusahaan.

3. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi, sumbangan pemikiran, serta referensi dalam rangka meningkatkan wawasan dan pemahaman serta pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya yang menyangkut tentang prinsip konservatisme akuntansi dan faktor – faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi antara lain seperti set kesempatan investasi, kepemilikan institusional, kesulitan keuangan, kontrak hutang, kontrak kompensasi, litigasi, pajak, biaya politis, dan tata kelola perusahaan.

4. Bagi perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi tambahan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pencatatan akuntansinya dengan menerapkan prinsip konservatisme.

5. Bagi investor dan kreditor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi tambahan serta sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai alternatif dalam memahami laporan keuangan yang disajikan oleh setiap perusahaan apakah menerapkan prinsip konservatisme dalam pembuatan laporan keuangannya sehingga dapat membantu sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan berinvestasi dan memberikan pinjaman dana yang tepat.